



# KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Bangka Pos       Rakyat Pos       Radar Bangka  
 Babel News       Babel Pos       Lainnya : \_\_\_\_\_

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	2
																						0
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		7	8	9	10	11	12	1
																						9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	



Bupati Bangka, Mulkan menunjukkan piagam rathan opini WTP dari BPK Babel, Selasa (21/5/2019). (foto: istimewa)

## Pemkab Bangka Hattrick WTP

**SUNGAILIAT** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bangka Belitung, Selasa (21/5/2019).

Opini WTP atas laporan keuangan Pemkab Bangka tahun 2018 ini merupakan opini WTP yang ketiga kalinya diraih Pemkab Bangka secara berturut-turut, sejak tahun 2006

dan 2017.

"Jadi hari ini (kemarin-red) kami (pemkab) menerima laporan LHP BPK Babel, semua ini atas ridho Allah SWT serta doa masyarakat dan kerja keras bersama," kata Bupati Bangka, Mulkan kepada sejumlah awak media di Sungailiat, Selasa (21/5/2019).

Mulkan menjelaskan diraihnya penghargaan WTP, tidak membuat Pemkab Bangka dapat mengabaikan kinerja untuk kedepannya, oleh sebab

itu dia mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Bangka agar terus meningkatkan kinerja.

"Kedepannya menjadi tantangan kami untuk mempertahankan, kami selaku kepala daerah akan terus melakukan pengawalan, terutama untuk tahun 2019 ini," jelas Mulkan.

Pihaknya berharap seluruh organisasi perangkat daerah kedepannya lebih taat serta

tertib administrasi dan harus benar-benar berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, baik dari tingkat pusat maupun provinsi.

"OPD harus lebih teliti dan taat kedepannya dengan aturan yang berlaku, mengingat masih ada catatan dalam hal kepatuhan tertib administrasi dari BPK Bangka Belitung yang harus diselesaikan dalam 60 hari kerja kedepan," pungkas Mulkan. (2nd/mg419/10)